



# Tim Pemantau Pemanfaatan Air Tanah Terbentuk

■ Yulianingsih

**Regulasi itu penting agar persoalan sosial tidak terjadi lagi.**

YOGYAKARTA — Pemkot Yogyakarta langsung bertindak setelah mendapat laporan tentang sumur warga akibat pemanfaatan air tanah oleh pihak hotel. Saat ini pemkot setempat bahkan telah membentuk tim khusus untuk memantau pemanfaatan air tanah oleh hotel atau instansi lain di Kota Yogyakarta.

Tim terdiri dari PDAM Tirtamarta, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, serta Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). "Saya sudah minta agar semua ditindaklanjuti sesuai aturan. Tidak hanya satu hotel saja, tapi semuanya," kata Wali

Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Kamis (4/9).

Tim ini, kata dia, akan menyelidiki perizinan maupun seberapa besar pemanfaatan air tanah oleh hotel dan instansi lain. "Jadi bukan hanya Fave Hotel saja," katanya.

Menurut Haryadi, saat ini pihaknya juga tengah menyusun aturan baru terkait sosialisasi pembangunan di Kota Yogyakarta yang mendapat protes dari masyarakat. Bukan hanya pembangunan hotel, tetapi juga penataan pedagang kaki lima di Mangkubumi dan Stasiun Lempuyangan.

"Akar masalah lebih banyak karena sosialisasi yang kurang. Karenanya sedang kita godok adanya aturan baru," ujarnya.

Menurutnya, aturan baru itu nantinya akan mengatur tentang tata cara dan kewajiban sosialisasi

persoalan pembangunan di Kota Yogyakarta. "Ini bukan hanya hotel saja ya tapi apapun terkait pembangunan," ujarnya. Aturan baru ini bisa berbentuk peraturan wali kota atau surat edaran.

Selain mengatur tata cara dan tahapan sosialisasi, aturan baru itu juga akan mengatur tentang target capaian dari sosialisasi yang dilakukan. Dengan demikian, semua kegiatan pembangunan yang dilakukan benar-benar bisa tepat sasaran dan bukan hanya dijadikan prasyarat untuk mengajukan izin pembangunan semata.

Menurutnya, jika pengusaha mampu melakukan sosialisasi dengan benar, maka masyarakat akan mampu bersinergi dengan investasi yang ada di sekitarnya. "Kita semua belajar dari kejadian yang sudah ada. Regulasi itu penting agar persoalan sosial tidak terjadi lagi," katanya.

Seperti diketahui, puluhan warga Miliran menggelar aksi protes terhadap Hotel Fave yang berlokasi di Jalan Kusumanegara Yogyakarta. Hotel ini sempat menggunakan sumur dalam untuk pemenuhan kebutuhan airnya. Akibat pembuatan sumur dalam tersebut, puluhan sumur milik warga sekitar sejak beberapa bulan ini mengering.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Toto Suryonoto mengaku, temuan di Fave Hotel yang tidak memiliki izin pemanfaatan air tanah, jadi pintu masuk untuk menyelidiki hotel-hotel lainnya.

Pihaknya kini masih mendata secara rinci terkait dokumen perizinan setiap hotel. Jika diketahui izin tak lengkap, langsung disidik dan dilakukan penyege-  
 lan. "Kita akan selidiki hotel lain apakah ada yang sama atau tidak," ujarnya. ■ ed : eko widiyatno

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Ketertiban			
4. Badan Lingkungan Hidup			
5. PDAM Tirtamarta			

Yogyakarta, 24 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005